

Wako: PPK & PPS Jangan Bermain

BATAM, PM: Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Batam, siap bertugas mensukseskan pemilihan umum (Pemilu) 2019 mendatang. Sebanyak 228 orang panitia, dilantik, terdiri dari 36 PPK dan 192 PPS, dilantik di Hotel Harmoni One Batam Centre, Rabu (7/3).

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi mengatakan, para PPK dan PPS yang dilantik bisa berbaur dan bersinergi dengan perangkat pemerintah di lingkungan masing-masing. Agar pelaksanaan pemilu legislatif dan presiden 2019 mendatang berjalan lancar. Tentunya, Batam bisa menjadi contoh pelaksanaan pemilu yang baik dan aman.

"Saya ingin bapak/ibu yang dilantik ini bisa mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Sehingga nanti Batam menjadi contoh. Pemilu yang baik dan lancar ada di tangan panitia PPK dan PPS sebagai pelaksana," kata dia.

Rudi juga, mengimbau kepada PPK dan PPS yang dilantik, jangan ada yang terpancing dalam pelaksanaan pemilu mendatang. Karena sanksi akan diberikan bagi mereka yang ketahuan.

"Jika ada yang bermain tentunya KPU bisa menindaknya sesuai dengan aturan yang ada. Tapi semoga saja tidak ada, dan semua melaksanakan tugasnya dengan terarah," imbau Rudi.

Ketua Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam, Agus Setiawan meminta kepada seluruh panitia baik PPK dan PPS untuk dapat bersinergi dengan perangkat pemerintah di tingkat kecamatan, kelurahan, hingga RW dan RT. Ini mengingat tahapan pertama relatif berat, terkait pemutakhiran data pemilih.

"Karena saat ini ada Forum Komunikasi RT/RW. Mereka minta dilibatkan pada proses pemutakhiran data pemilih. Jangan tinggalkan mereka karena perangkat ini yang punya wilayah, tahu warganya," ujarnya.

Dalam pemutakhiran data kata Agus ada masa evaluasi bagi PPK PPS yang dilantik. Pihaknya memberi batas waktu penilaian sampai September 2018. Ia juga menegaskan jika dalam masa enam bulan ke depan panitia ini tidak dapat memaparkan hasilnya. Pihaknya menganggap tidak layak di sertakan.

"Kita kasih waktu enam bulan untuk mereka (PPK-PPS) bekerja. Kalau tidak mampu maka mau tidak mau kita tidak bisa bekerjasama kembali," kata Agus.

Diakui Agus, saat ini banyak anggota PPK dan PPS baru. Dan sebagian adalah anggota lama. Perubahan ini dikarenakan, adanya aturan maksimal dua periode. Namun, ia yakin para panitia yang dipilih bisa berkompeten menjalankan tugasnya nanti. Agus juga mengarahkan kepada anggota baru bergabung bisa segera menyesuaikan diri dengan yang anggota yang lama.

"Mereka yang terpilih adalah orang yang benar-benar berkompeten karena telah melalui penguasaan dan seleksi terbuka. Dan mampu membina mereka untuk bisa bersinergi dengan bapak ibu camat lurah. Bagi yang baru bisa belajar dengan yang lebih senior," harap Agus.

Besar harapan Agus pelaksanaan pemilu yang setahun lagi digelar serentak bisa berjalan lancar dan aman. Dan masing-masing pihak yang ikut memeriahkan aksi demokrasi ini bisa menahan diri, dari hal merugikan. (hbb)



Sopir Angkot Demo Taksi Online

"Mati Kami Lama-lama Pak"

BATAM, PM: Ratusa sopir Metro Trans Batam menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Pemerintah Kota Batam, Batam Centre, Kamis (8/3). Mereka menuntut pemerintah menertibkan angkutan taksi bernasis online yang beroperasi di Batuaji. Pasalnya, menurut mereka pendapatan mereka jadi berkurang.

Koordinator demo, Binsar Panjaitan mengatakan, aksi mereka itu melibatkan ratusan pengemudi Metro Trans dengan rute trayek Panbil-Kawasan Industri Mukakuning-Tembesi-Sagulung-Tanjungcang. Dia mengatakan sejak adanya angkutan taksi berbasis online penghasilan mereka sebagai sopir



DERETAN angkutan kota yang terparkir di Jalan Engku Putri, Batam Centre.

angkot yang selama ini sudah jauh berkurang, makin berkurang lagi. Dalam seharinya mereka biasanya bisa mendapatkan pendapatan Rp80 ribu, saat

ini paling banyak hanya separohnya saja. "Sekarang Rp40 ribu aja sehari dapat sudah syukur," katanya.

Sehingga lanjut Binsar, mereka menolak kehad-

iran taksi berbasis online beroperasi di wilayah trayek mereka. Terutama mengambil penumpang di kawasan industri. Mereka juga menuntut pemerintah

tegas dalam hal tersebut, dengan melakukan razia. "Kenyataan sekarang, jangan nyari penumpang, nyari bensin saja kami susah. Kalau tidak bisa dicari solusinya kembalikan plat hitam kami, kami akan masuk ke sistem online, silahkan Dishub kembalikan, mohon bapak tanggap. Satu mobil satu penumpang, mati kami lama-lama Pak," ujar Binsar, dalam pertemuan bersama Wali Kota Batam Muhammad Rudi SE.

Bahkan dia mengancam, pihaknya akan menangkapi taksin berbasis online jika terbukti mengangkut penumpang di kawasan Batuaji dan sekitarnya. "Selama belum ada ijin

kita akan mengamankan taksi online yang kedapatan mengangkut penumpang," kata Binsar.

Sementara itu, Wali Kota Batam Rudi dalam pertemuan tersebut mengatakan tidak memiliki kewenangan terkait aturan main taksi berbasis online di Kota Batam. "Bukan kita tidak mau menangani, sangat ruwet masalah taksi online dan konvensional ini. Kami hanya melaksanakan aturan yang ada, pusat yang menentukan. Saya sudah berfikir agar adanya peremajaan, pelayanan kita juga harus maksimal agar bisa bersaing dengan online," kata Rudi.

Dia pun meminta Kadihub Kota Batam Yusfa Hendri untuk mencari solusi terkait persoalan demo tersebut. "Pak Yusfa harus mikir, cari solusi untuk itu, segera lakukan operasi di wilayah Batuaji," kata Rudi. (abg)